

Pengaruh Faktor Koneksi Politik, Kompensasi Eksekutif, dan Prinsip Konservatisme terhadap Penghindaran Pajak

Janet Devira Sondakh dan Maria Yosaphat Dedi Haryanto*
Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musi Charitas
*Email:mydediharyanto@ukmc.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh koneksi politik, kompensasi eksekutif, dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022. Data dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan tahun 2022 yang terdapat di laman idx.co.id. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel akhir sebanyak 450 sampel. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan memeriksa terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik, kompensasi eksekutif, dan prinsip konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Kompensasi eksekutif, Koneksi politik, Konservatisme akuntansi, Penghindaran pajak*

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2020 silam, ekonomi global mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian yang dialami Indonesia diperkirakan telah mencapai 427 miliar dollar AS atau sekitar 6.046 triliun rupiah (2020). Salah satu penyebab dari fenomena tersebut berkaitan dengan pengalihan dan penyalahgunaan pembayaran pajak perusahaan internasional dan perusahaan swasta. Berdasarkan dari riset yang telah dilakukan oleh *Tax Justice Network (TJN)*, perusahaan multinasional telah memindahkan sekitar 1,38 triliun dollar AS keuntungan melalui negara surga pajak (CNN Indonesia). Tindakan ini dikenal dengan sebutan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Beberapa kasus penghindaran pajak yang terkemuka, seperti perusahaan Apple diduga telah mengalokasikan dana sekitar Rp 15,2 triliun dari keuntungan mereka di Italia ke Irlandia. Tindakan ini dilakukan untuk membayar pajak yang lebih rendah di Italia (Marsela, 2016). Selain itu, ada perusahaan Google yang telah terbukti melakukan penyelewengan dengan nominal sebesar 327 triliun rupiah. Lagi-lagi tujuan dari tindakan ini untuk meminimalisir tagihan pajaknya (Indrayanti, 2019).

Facebook Inc. juga telah terbukti melakukan penyelewengan peraturan perpajakan dengan menyimpan laba mereka di Irlandia. Tindakan ini membuat Facebook membayar denda sebesar US\$ 9 miliar atau sekitar Rp 123 triliun (Kurniati, 2020). Pada tahun 2017, Amazon juga terlibat kasus penghindaran pajak. Amazon telah melakukan pelaporan laba di Amerika Serikat sebesar US\$ 8,2 miliar. Namun, Amazon diduga tidak membayarkan kewajiban pajaknya secara penuh melainkan hanya membayar pajak sebesar 11,4% saja (Rahkma dan Jatmiko, 2018).

Untuk kasus di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk menjadi kasus penghindaran pajak yang cukup terkenal. Pada tahun 2017, perusahaan tersebut diduga telah mengatur pembayaran pajaknya sejak tahun 2009-2017, sehingga perusahaan hanya membayar pajak sekitar 125 juta dollar AS atau sekitar 1,75 triliun rupiah. Upaya tersebut dilakukan melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, *Coaltrade Services Internasional* (Sugianto, 2019). PT Indofood Sukses Makmur Tbk. juga pernah terlibat dalam kasus penghindaran pajak tahun 2015 dengan modus mendirikan badan usaha yang baru dan memindahkan seluruh aset, utang, serta modalnya kesana. Indofood diduga telah menghindari pajaknya sebesar Rp 1,3 miliar (Yusuf dan Maryam, 2022).

Menurut Meliandari dan Utomo (2022), ada lima aspek mengapa wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak. Pertama, terkait dengan adanya pemeriksaan pajak, efek deteksi, dan denda yang diberikan. Norma yang berlaku baik secara pribadi maupun sosial menjadi aspek kedua dalam konteks mematuhi kewajiban perpajakan. Aspek ketiga ada pada kesempatan untuk patuh dan tidak patuh. Perusahaan akan patuh ketika aturan pajaknya sederhana dan biaya kepatuhannya

rendah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi aspek keempat wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Aspek kelima ada pada kewajiban/kesadaran moral yang dimiliki oleh wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Selain lima aspek tersebut, komponen internal perusahaan juga berperan besar terhadap terjadinya penghindaran pajak.

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengefisienkan beban pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena tidak keluar dari ranah peraturan perpajakan. Pada praktiknya diimplementasikan dengan mencari kelemahan (*grey area*) pada peraturan maupun kebijakan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak menjadi salah satu upaya dalam perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan oleh wajib pajak dengan tujuan meminimalisir biaya pajaknya. Penghindaran pajak yang pada awalnya upaya legal apabila dilakukan secara berlebihan dan berkepanjangan dapat merujuk ke arah ilegal. Penghindaran pajak yang ilegal disebut penggelapan pajak. Perusahaan harus mempertimbangkan sebaik mungkin batasan dari tindakan penghindaran pajak yang didasari dari upaya perencanaan pajak agar perusahaan tidak melampaui batas dan terhindar dari sanksi hukum pidana yang diberlakukan oleh pemerintah.

Tujuan wajib pajak melakukan perencanaan pajak tentunya ingin meminimalisir beban pajak yang terutang. Apabila perencanaan pajak yang dilakukan tersebut secara cermat dan benar, banyak keuntungan yang dapat dicapai perusahaan, yaitu pengeluaran kas yang terkontrol, karena beban pajak menjadi salah satu unsur biaya perusahaan yang dapat dikendalikan. Keuntungan lainnya berupa pengendalian terhadap perputaran kas masuk dan kas keluar (*cash flow*). Dengan dibentuknya perencanaan pajak yang komprehensif, kepentingan terkait pajak menjadi lebih terarah. Anwar (2013) mengemukakan bahwa dalam *tax planning* sendiri, ada 3 upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajaknya, yaitu *tax avoidance*, *tax evasion* dan *tax saving*.

Teori Agensi merupakan teori yang mendasari bagaimana kondisi dari kontrak kerja yang menunjang fungsi dari *principal* dan perilaku dari kepentingan *agent*. Hubungan antara pemegang saham dengan manajemen dapat memicu permasalahan karena adanya masalah asimetris informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi dipicu oleh dua hal, yaitu (a) *Adverse selection*, bentuk dari asimetris informasi dimana seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan transaksi bisnis memiliki informasi yang lebih banyak dari pihak lainnya dan (b) *Moral hazard*, bentuk asimetri informasi yang dilakukan demi keuntungan pribadi dan tidak selaras dengan apa yang telah menjadi kontrak atau perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Kegiatan bisnis perusahaan memerlukan manajemen untuk mengelola dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Manajemen mendapatkan kepercayaan dari pemilik dan atas jasa itulah manajemen akan memperoleh kompensasi. Diaz dan Espa (2008) menyatakan bahwa pemberian kompensasi dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja atau mencapai produktivitas yang tinggi. Namun, kadang kala eksekutif memanfaatkan skema kompensasi tersebut untuk mendapatkan bonus yang maksimal sehingga melakukan berbagai strategi efisiensi. Salah satu strateginya adalah eksekutif dapat melakukan upaya terbaik dalam efisiensi pembayaran pajak penghasilan di dalam perusahaan agar perusahaan memberikan kompensasi bonus yang besar kepada eksekutif tersebut.

Kompensasi yang diberikan oleh *principal* menjadi sebuah motivasi kepada eksekutif untuk bekerja semaksimal mungkin. Manajemen akan melakukan apa yang dikehendaki oleh pemilik saham apabila mereka juga mendapat keuntungan dari apa yang mereka kerjakan. Akibatnya, kompensasi eksekutif yang diberikan nantinya akan memotivasi manajemen dalam upaya efisiensi pembayaran pajak. Manajemen akan mencari strategi agar perusahaan dapat membayar pajak seminimal mungkin dengan laba yang tetap tinggi dalam bentuk apapun yang bahkan berpotensi diluar dari kontrak kerja antara pemilik saham dan manajemen.

Isu koneksi politik merupakan hal yang menarik terkait dengan efisiensi pajak karena adanya indikasi bahwa perusahaan dengan efisiensi pajak karena adanya indikasi bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang kuat akan memperoleh keuntungan yang tidak didapatkan oleh perusahaan lainnya. Salah satu keuntungan dari koneksi politik dalam perusahaan seperti saat adanya pemeriksaan pajak, pemerintah tidak akan memeriksa secara detail dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik dengan pemerintah (Sawitri dkk., 2022). Terkait

hal ini, perusahaan akan cenderung menyalahgunakan koneksi yang dimilikinya tersebut sebagai kesempatan dalam melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah.

Political Favoritism Effect merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa suatu perusahaan yang terkoneksi dengan politik dapat membantu perusahaan tersebut melakukan lobi dengan pemerintahan. Teori ini merupakan teori politik yang dikaitkan dengan observasi yang dikembangkan oleh Jian di tahun 2012 mengenai hubungan koneksi politik dengan pemerintah di Cina. *Political Favoritism Effect* juga menyatakan bahwa koneksi politik yang kuat dalam perusahaan dapat menciptakan peluang besar dalam mempengaruhi pemerintah dalam bidang apapun. Badan perpajakan yang dilobi perusahaan bertujuan agar dapat mengelak dari pemeriksaan pajak, menekan denda, dan perihal lainnya terkait dengan pajak yang menguntungkan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki koneksi dalam konteks politik akan menjadi salah satu strategi dalam mendapatkan keuntungan-keuntungan khusus yang tidak dapat diterima oleh perusahaan lainnya, yaitu mendapat akses yang lebih mudah dalam menjangkau ranah pemerintahan. Selain daripada akses lebih mudah ke ranah pemerintah, keuntungan lainnya adalah risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah. Dari keuntungan tersebut, perusahaan akan memanfaatkan kesempatan dengan cenderung tidak transparan dalam melaporkan laporan keuangan dan kewajiban pajaknya serta akan lebih berani melancarkan aksi penghindaran pajak.

Prinsip konservatisme akuntansi menyatakan bahwa pendapatan di perusahaan harus diakui selambat-lambatnya, sedangkan kerugian/biaya harus diakui secepat-cepatnya. Prinsip waspada dalam mengantisipasi kondisi di masa mendatang terhadap pendapatan dan biaya perusahaan akan berdampak pada laba perusahaan yang kecil. Laba yang kecil berimbas ke jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi tidak sebesar sebelum menggunakan prinsip konservatisme akuntansi tersebut.

Penerapan prinsip konservatisme akuntansi oleh manajemen pada pelaporan keuangan perusahaan juga dapat memunculkan isu penghindaran pajak. Penerapan prinsip ini dapat membuat laba menjadi lebih rendah sehingga pengenaan pajak akan semakin rendah. Prinsip konservatisme akuntansi berdampak pada pendapatan yang diakui selambat mungkin dan biaya diakui secepat mungkin. Penerapan prinsip ini membuat penundaan pembayaran pajak penghasilan karena laba yang dihasilkan pada tahun berjalan akan lebih kecil dari sebelumnya (Savitri, 2016:91). Dari pernyataan tersebut, apabila perusahaan menerapkan prinsip ini secara berlebihan, maka penghindaran pajak dapat saja terjadi dengan mengingat bahwa dasar dari pembayaran pajak penghasilan adalah laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.

Berbagai penelitian menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Beberapa hasil penelitian seperti Mayangsari (2015), Madyanata, dkk (2020), dan Maulana, dkk (2021) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh kompensasi eksekutif. Bahkan secara spesifik Putri dan Indriani (2020) dan Regina, dkk (2021) membuktikan bahwa semakin besar kompensasi eksekutif, semakin tinggi penghindaran pajaknya. Selanjutnya, koneksi politik juga menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang terbukti secara empiris terjadi di berbagai sektor seperti sektor keuangan (Rosdiani dan Hidayat, 2020), sektor non keuangan (Butje dan Tjondro, 2014), termasuk sektor manufaktur (Fajri, 2019; Maidina dan Wati, 2020; Sundari dan Aprilina, 2017) dan sektor otomotif (Pangestu dan Pratomo, 2020). Lebih lanjut penelitian Az'ari dan Lastiati (2022) dan Nainggolan dan Muhammad (2022) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik akan semakin meningkatkan penghindaran pajak. Disamping itu, penghindaran pajak juga disebabkan oleh prinsip konservatis dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian Pangestu dan Pratomo (2020), Rosdiani dan Hidayat (2020), Pratiwi dan Djajanti (2022), dan Fitriani (2023) menunjukkan konservatisme akuntansi berperan dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, bahkan Sundari dan Aprilina (2017) menegaskan bahwa prinsip konservatif ini berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang belum konsisten maka penelitian ini mempelajari kembali hubungan antara faktor koneksi, kompensasi dan konservatis dengan penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh koneksi politik (H_1), kompensasi eksekutif (H_2) dan prinsip konservatisme akuntansi (H_3) terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar pada tahun 2022 di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan beberapa kriteria dalam memilih sampel yaitu perusahaan yang mengalami laba positif sepanjang tahun 2022 dan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangannya. Data penelitian berasal dari laporan keuangan perusahaan tahun 2022 dari laporan tahunan yang diakses dari laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan *website* resmi perusahaan sebagai sumber data untuk melengkapi data yang tidak ditemukan di BEI. Hasil pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah	Persentase
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2022	816	
2.	Perusahaan yang mengalami laba negatif/kerugian	(177)	21,70%
3.	Perusahaan yang penyajian LK bukan menggunakan Rupiah	(90)	11,03%
4.	Perusahaan yang belum menerbitkan LK	(47)	5,76%
Jumlah sampel		502	

Penelitian ini memiliki 3 hipotesis dengan variabel yang terdiri dari 3 variabel independen dan sebuah variabel dependen. Variabel independennya adalah penghindaran pajak dengan menggunakan proksi Effective Tax Rate (ETR) sama seperti penelitian Hidayat dan Fitria (2018). Variabel independennya adalah kompensasi eksekutif, koneksi politik dan konservatisme akuntansi. Kompensasi eksekutif merupakan segala sesuatu yang diserahkan kepada eksekutif dalam bentuk balas jasa atas pencapaian kinerjanya (Mayangsari, 2015). Koneksi politik merupakan suatu hubungan atau ikatan yang dapat melancarkan/memudahkan segala urusan di ranah negara (Fajri, 2019) dan pengukurannya sama dengan penelitian Khoirunnisa dan Venusita (2020). Sedangkan konservatisme akuntansi diukur dengan metode *earning/accrual measures* seperti yang dilakukan Pratiwi dan Djajanti (2022). Pengukuran dari variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Simbol	Jenis Variabel	Pengukuran
Koneksi Politik	KP	Independen	<i>Dummy</i> , dimana nilai 1 jika ada komisaris dan direksi yang memiliki pengalaman di pemerintahan dan nilai 0 jika tidak ada yang memiliki latar belakang tersebut.
Kompensasi Eksekutif	KE	Independen	Ln Total kompensasi yang diterima
Konservatisme Akuntansi	KA	Independen	$\frac{\text{Net Income} - \text{Cash Flow Operational}}{\text{Total Assets}}$
Penghindaran Pajak	PP	Dependen	$\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$
Ukuran Perusahaan	UP	Kontrol	Ln Total Aset
Risiko Perusahaan	RP	Kontrol	$\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk pengujian hipotesisnya. Analisis regresi dapat digunakan untuk menguji sebesar apa pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2016). Persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PP = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 KE + \beta_3 KA + \beta_4 UP + \beta_5 RP + e$$

Keterangan:

PP	= Penghindaran Pajak
α	= Konstanta (tetap)
β	= Koefisien regresi variabel independen
KP	= Koneksi Politik
KE	= Kompensasi Eksekutif
KA	= Konservatisme Akuntansi
UP	= Ukuran Perusahaan
RP	= Risiko Perusahaan
e	= Kesalahan (<i>error</i>)

Sebelum dilakukan analisis regresi, penelitian ini memeriksa asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogorov – Smirnov* (K-S) dengan dasar pengambilan keputusan nilai signifikansi di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Pengujian multikolinearitas menggunakan nilai *Tolerance* atau *VIP* dimana jika *Tolerance* $\geq 0,10$ atau nilai *VIP* ≤ 10 , maka tidak memiliki multikolinearitas. Terakhir, pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independennya. Semua pengolahan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Nilai *mean* variabel kompensasi eksekutif menunjukkan nilai 25.109 dengan standar deviasi sebesar 72.356. Hasil pada tabel 3 ini menunjukkan bahwa besar kompensasi manajemen antar perusahaan cukup besar variasinya. Variabel prinsip konservatisme memiliki nilai *mean* sebesar 0,6361. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup konservatif dalam menyusun laporan keuangannya. Selain itu terlihat juga bahwa nilai rata-rata dari variabel penghindaran pajak sebesar 2,234. Nilai tersebut berarti bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan cukup moderat.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	SD
KE	4.20	1.379	25.109	72.356
KA	-0,1391	3,0559	0,6361	0,5600
PP	0,0001	1,2249	0,2340	0,1643

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa persamaan regresi mengalami masalah asumsi klasik. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan berbagai upaya seperti mengeliminasi data *outlier*. Perusahaan yang datanya termasuk ke dalam *outlier* sebanyak 52 perusahaan. Hasil *outlier* ini mengurangi jumlah sampel dari 502 menjadi 450. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian sebelum dan sesudah dilakukan *outlier*. Hasil uji normalitas kemudian menunjukkan nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* (K-S) sebesar 0,000 sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi memiliki nilai residu yang tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas dengan K-S

Keterangan	Sebelum <i>Outlier</i>	Setelah <i>Outlier</i>
Jumlah Sampel	502	450
Asymp. Sig (2-tailed)	0,000	0,000

Hasil pengujian asumsi yang lain dapat dilihat pada tabel 5 dan 6. Hasil pengujian asumsi klasik setelah *outlier* menunjukkan bahwa persamaan regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas, namun belum terbebas dari heteroskedastisitas dan skor *Kolmogorov Smirnov*. Oleh sebab itu untuk pengujian hipotesisnya, penelitian ini menggunakan metode *Bootstrapping*.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
KP	0,900	1,111	Tidak memiliki multikolinearitas
KE	0,437	2,291	Tidak memiliki multikolinearitas
KA	0,905	1,105	Tidak memiliki multikolinearitas
UP	0,369	2,712	Tidak memiliki multikolinearitas
RP	0,858	1,165	Tidak memiliki multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Glejser

Variabel	Sig.	Kesimpulan
KP	0,306	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KE	0,002	Terjadi heteroskedastisitas
KA	0,604	Tidak terjadi heteroskedastisitas
UP	0,893	Tidak terjadi heteroskedastisitas
RP	0,002	Terjadi heteroskedastisitas

Hasil Pengujian Model Regresi

Tabel 7 menunjukkan hasil analisis regresi. Model regresi memiliki nilai *R Square* sebesar 0,069. Hasil ini bermakna bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 6,9%. Uji F menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hal ini menandakan model regresi ini layak untuk digunakan menganalisis data.

Hasil model regresi dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan pengolahan data, maka hasil persamaan regresinya adalah

$$PP = 0,668 + 0,019 KP + 0,004 KE + 0,025 KA - 0,022 UP + 0,139 RP$$

Seluruh koefisien menunjukkan arah positif, kecuali koefisien ukuran perusahaan. Jika dilihat dari signifikansinya, seluruh variabel independen menunjukkan nilai yang lebih besar dari alpha 0,05. Namun dua variabel kontrol, yaitu ukuran dan risiko perusahaan, terbukti signifikan. Berdasarkan nilai pengujian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa H_1 , H_2 , dan H_3 dalam penelitian ini ditolak. Jadi, hasil ini menunjukkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, variabel koneksi politik, kompensasi eksekutif, dan prinsip konservatis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 7. Hasil Analisis Model Regresi

Model	<i>R Square</i>	Nilai F	Sig.
Persamaan Regresi	0,069	6,551	0,000***
Variabel	B	Nilai t	Sig. (Bootstrap)
a	0,668	4,903	0,000
KP	0,019	1,058	0,373
KE	0,004	0,538	0,538
KA	0,025	1,756	0,084*
UP	-0,022	-3,312	0,002**
RP	0,139	3,990	0,001**

Level signifikansi statistik: *** sig.<0.01, ** sig.<0.05, *sig.<0.10

Pembahasan

Koneksi politik yang dimiliki perusahaan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak oleh manajemen. Perusahaan tidak dapat menggunakan koneksi politik yang dimilikinya sebagai kesempatan dalam melakukan pembayaran pajak yang rendah, terlebih lagi apabila saham perusahaan hampir seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010, perusahaan yang hampir seluruh sahamnya dikuasai oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah risikonya, peraturan ini akan mencerminkan keyakinan tersendiri bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak. Kedekatan secara politik yang dibangun oleh manajemen menjadikan perusahaan lebih berkomitmen dan lebih waspada dalam mengambil kebijakan apapun. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra perusahaan dan berharap tetap dapat menjadi wajib pajak yang patuh serta terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan yang tidak diinginkan.

Besarnya jumlah kompensasi yang diberikan oleh pemilik saham kepada para eksekutif tidak dapat membuat para eksekutif melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Bagi manajemen, penghindaran pajak merupakan risiko yang dapat mempengaruhi reputasi mereka. Besarnya kompensasi yang diterima manajemen ini tentunya tidak akan sebanding dengan kemungkinan risiko yang diakibatkan dari tindakan penghindaran pajak. Akibatnya, kompensasi berbasis tunai tidak memotivasi para eksekutif dikarenakan kompensasi ini tidak menjanjikan adanya timbal balik yang memadai di masa mendatang. Kompensasi berbasis opsi saham mungkin lebih memotivasi para eksekutif dalam mempertimbangkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Para eksekutif yang mendapatkan kompensasi berbasis opsi saham tentunya akan memperoleh timbal balik yang lebih menjanjikan di masa depan dengan membeli saham perusahaan tersebut dan akan mendapatkan *return* saham nantinya.

Prinsip konservatisme yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak. Pada dasarnya, konservatisme akuntansi merupakan sebuah prinsip yang dapat dilakukan oleh akuntan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa depan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Dampak dari penggunaan prinsip konservatisme akuntansi memang sempat diindikasikan sebagai pola manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Pemerintah mengantisipasi dampak dari penerapan prinsip ini terhadap pelaporan pajak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.011/2012 terkait Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai biaya yang menjelaskan terkait cadangan piutang, perusahaan tidak diperkenankan untuk membukukan cadangan piutang ragu-ragu. Cadangan ini pada dasarnya akan mengurangi laba pada periode tersebut. Apabila perusahaan tidak menyatakan cadangan piutang pada periode berjalan, tentunya laba yang dihasilkan juga akan berbeda. Dengan demikian, perusahaan tidak memiliki celah untuk menjadikan prinsip ini sebagai kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan dilakukan untuk menyelidiki seberapa kuat ketiga variabel independen menjelaskan variabel penghindaran pajak dengan membagi sampel menjadi 2 kelompok berdasarkan klasifikasi dari variabel independen. Tabel 8 menunjukkan hasil dari uji beda antar kelompok. Hasil menunjukkan bahwa memang tidak ada perbedaan dalam perilaku penghindaran pajak antara perusahaan memiliki koneksi politik dan kompensasi eksekutif. Namun, pada variabel prinsip konservatisme ditemukan bahwa ada perbedaan besar penghindaran pajaknya antara perusahaan yang menerapkan konservatisme dengan yang tidak menerapkan. Berdasarkan nilai *mean rank* untuk konservatisme akuntansi menunjukkan bahwa perusahaan yang konservatif akan lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hal ini memberi bukti tambahan bahwa prinsip akuntansi menjadi menjadi faktor yang membuat beban pajak perusahaan menjadi lebih efisien walaupun bukan sebagai faktor penyebab penghindaran pajak.

Tabel 8. Hasil Pengujian Tambahan: Uji Beda

Variabel	Klasifikasi	Mean Rank PP	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Koneksi Politik	Tidak Memiliki	229,92	0,239	Tidak Signifikan
	Memiliki	213,74		
Kompensasi Eksekutif	Rendah	229,55	0,274	Tidak Signifikan
	Tinggi	214,38		
Prinsip Konservatif	Tidak konservatif	221,19	0,022**	Signifikan
	Konservatif	270,92		

Level signifikansi statistik: *** sig.<0.01, ** sig.<0.05, *sig.<0.10

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa koneksi politik, kompensasi eksekutif, dan konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi politik di perusahaan hanya berperan sebagai hubungan kedekatan dengan pemerintah, perusahaan tidak memiliki celah untuk melakukan lobi kepada pemerintah dalam ranah perpajakan untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan. Kompensasi berbasis uang tunai tidak membuat para eksekutif termotivasi dalam melakukan penghindaran pajak karena kompensasi tersebut tidak sebanding dengan risiko yang akan terjadi. Perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akuntansi hanya untuk mengantisipasi risiko penerimaan dan pengeluaran uang di masa datang. Perusahaan juga tidak memiliki celah melakukan penghindaran pajak akibat adanya kebijakan pemerintah yang mengatur terkait cadangan piutang.

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas tahun pengamatan penelitian. Penelitian selanjutnya dapat juga memfokuskan pada perusahaan yang mengalami penghindaran pajak karena koneksi politik yang dimiliki perusahaan akan sangat berperan ketika perusahaan mengalami permasalahan pajak. Selain itu, variabel prinsip konservatis dapat menggunakan proksi yang lain seperti laba dibagi akrual (*earnings/accrual measure*) atau berbasis pasar, yaitu hubungan antara laba dan *return* (*earning/stock return relation measures*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Centro Inti Media.
- Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Dengan Koneksi Politik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 17–25. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.17-25>
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Diaz, M., & Espa, V. (2008). Bentuk dan Komponen Penentu Kompensasi Eksekutif. *Tema*, 9(1), 67–77.
- Fajri, A. (2019). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–18.
- Fitriani Saragih, Rahmat Daim Harahap & Saparuddin Siregar (2023). Analisis Determinan Praktik Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 73–81.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8).
- Hidayat, Agus Taufik, & Fitria, Eta Febrina. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 13(2): 157–68.
- Indrayanti, R. (2019). *Dokumen: Google Lakukan Penghindaran Pajak Rp 327 Triliun*. CNBC Indonesia.
- Khoirunnisa Asadanie, Nabila, & Venusita, Lintang (2020). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi* 4(1): 14.
- Kurniati, D. (2020). *Diduga Menghindari Pajak, Facebook Digugat Otoritas Pajak AS*. DDTC News.
- Madyanata, S., Wijaya, A. L., & Widiastara, A. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol.2.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131.
- Marsela, M. (2016). *Terbukti Kemplang Pajak, Apple Didenda Rp 4,8 Triliun*. CNN Indonesia.
- Maulana et al. (2021). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Profitabilitas Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *KORELASI Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi.*, 2, 1151–1170.
- Mayangsari, C. (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi

- Risiko Eksekutif Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Meliandari, N. M. S., & Utomo, R. (2022). Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 512–528. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>
- Nainggolan, C. F., & Muhammad, M. M. (2022). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *KALBISIANA: Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(3), 3382–3397.
- Pangestu & Pratomo. (2020). Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas, Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, Vol. 5, 26–34. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14182>
- Pratiwi, D. K., & Djajanti, A. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Financial Distress Terhadap Penghindaran Pajak dengan Karakteristik Eksekutif sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 5(2), 155.
- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Advance: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 64–75.
- Rahkma, S., & Jatmiko, B. (2018). *Amazon Diduga Tak Bayar Pajak*. Kompas.Com.
- Regina et al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 701–712.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Savitri, E. (2016). Konservatisme Akuntansi: Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Pustaka Sahila Yogyakarta*, 1, 103.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 8(1), 44–52.
- Studi: Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp 6.046 T. (2020). *CNN Indonesia*. 20 November 2020, <https://www.ssas.co.id/studi-penghindaran-pajak-rugikan-ekonomi-global-rp6-046-t/>.
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. DetikFinance.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Yusuf, M., & Maryam. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 88–107.